Sawala

Jurnal Administrasi Negara

ISSN: 2598-4039 (Online)
ISSN: 2302-2221 (Print)

Copyright © 2026, Rusito, Jumanah
http://doi.org/10.30656/sawala.v14i1.zzf2rt61 to this article
Page 30-50
Volume 14 Number 1 (Juni) 2026

CORE COMPETENCE PEMERINTAH DAERAH DALAM PERENCANAAN STRATEGIS (STUDI PADA KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN)

Rusito[1], Jumanah[2]

[1] Institut Kemandirian Nusantara, Banten, Indonesia

Abstract

This study analyzes the core competence of local government in strategic planning, particularly the integration of institutional capacity, policy innovation, human resource development, and digital governance within the Regional Medium-Term Development Plan (RPJMD) of Lebak Regency for 2025–2029. The theoretical reference is based on Hamel and Prahalad (1990), who identify three main dimensions of core competence: the ability to provide access to a wide variety of markets, significant contribution to perceived value or benefits, and competencies that are difficult for competitors to imitate. This research employs a descriptive qualitative approach through document analysis using the interactive analysis model of Miles, Huberman, and Saldaña (2019). The findings indicate that local government core competence plays an important role in expanding cross-sector development access, improving public service quality and community satisfaction, and strengthening regional competitiveness based on local potential. Strengthening these core competencies is therefore a strategic factor in supporting sustainable regional development and achieving Indonesia's Golden Vision 2045.

Keywords: : Core Competence, Strategic Planning, Local Government, Regional Development, Lebak Regency

Article history:
Submission: March 5, 2026
Revised: May 29, 2026
Accepted: June 5, 2026
Published: June 15 2026

**Corresponding author*
Email:Inspektur2026@gmail.com

This is an open-access article under the CC–BY NC-SA license

Sawala

Jurnal Administrasi Negara

ISSN: 2598-4039 (Online)
ISSN: 2302-2221 (Print)

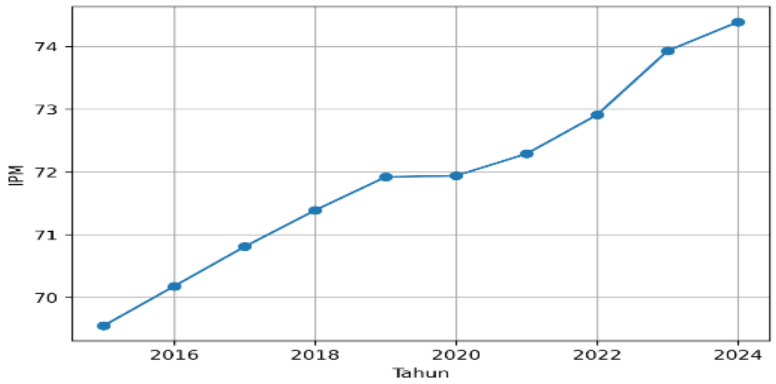
Copyright © 2026, Rusito, Jumanah
http://doi.org/10.30656/sawala.v14i1.zzf2rt61 to this article
Page 30-50
Volume 14 Number 1 (Juni) 2026

PENDAHULUAN

Perencanaan strategis merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk memastikan pembangunan berjalan efektif, terarah, dan berkelanjutan. Dalam konteks Indonesia, perencanaan pembangunan daerah tidak dapat dilepaskan dari kerangka pembangunan nasional jangka panjang sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) menuju Indonesia Emas 2045. Visi Indonesia Emas 2045 menekankan terciptanya negara maju, berdaya saing global, berkelanjutan, serta berbasis inovasi dan sumber daya manusia unggul. (UU no. 59/2024) Untuk mencapai visi tersebut, pemerintah daerah memiliki peran strategis sebagai pelaksana utama pembangunan di tingkat lokal melalui sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah.

Tahap pembangunan nasional lima tahunan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 menjadi periode awal menuju pencapaian Indonesia Emas 2045. RPJMN ini menekankan transformasi ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur berkelanjutan, reformasi birokrasi, serta penguatan ketahanan sosial dan lingkungan. Berbagai program prioritas nasional seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, pengembangan ekonomi hijau, digitalisasi pemerintahan, serta penguatan daya saing daerah membutuhkan keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam implementasinya. (Perpres No. 12/2025). Grafik tren IPM Indonesia berikut menunjukkan perkembangan kualitas pembangunan manusia dalam beberapa tahun terakhir sebagai refleksi capaian pembangunan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat.

Grafik 1
Tren Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia 2015-2024



Sumber :Badan Pusat Statistik, 2025

Grafik IPM tahun 2015–2024 menunjukkan tren peningkatan yang relatif konsisten, dari sekitar 69,5 pada tahun 2015 menjadi lebih dari 74 pada tahun 2024. Kenaikan ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah tidak hanya berhasil meningkatkan capaian pembangunan manusia secara kuantitatif, tetapi juga memperlihatkan adanya penguatan kompetensi inti (*core competence*) dalam tata kelola pembangunan daerah. Dalam perspektif teori *core competence*, kompetensi inti pemerintah daerah tercermin pada kemampuan kolektif organisasi dalam mengintegrasikan sumber daya, kebijakan, inovasi pelayanan, dan kapasitas aparatur untuk menghasilkan nilai publik yang berkelanjutan. Program-program strategis

This is an open-access article under the CC–BY NC-SA license

Sawala
Jurnal Administrasi Negara
ISSN: 2598-4039 (Online)
ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright © 2026, Rusito, Jumanah
http://doi.org/10.30656/sawala.v14i1.zzf2rt61 to this article
Page 30-50
Volume 14 Number 1 (Juni) 2026

pemerintah daerah memiliki hubungan langsung dengan peningkatan kompetensi inti tersebut. Pada sektor pendidikan, misalnya, implementasi program peningkatan akses pendidikan, digitalisasi layanan sekolah, penguatan kompetensi guru, serta kebijakan bantuan pendidikan menunjukkan adanya kompetensi inti dalam pengelolaan sumber daya manusia dan pelayanan publik berbasis kebutuhan masyarakat. Hal ini memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam menciptakan sistem pendidikan yang adaptif dan berorientasi pada kualitas. Dampaknya terlihat pada peningkatan komponen rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah yang menjadi bagian penting dalam pembentukan IPM.

Dalam konteks pembangunan daerah, konsep core competence pemerintah daerah menjadi semakin relevan karena berkaitan dengan kemampuan organisasi publik dalam mengelola sumber daya, pengetahuan, inovasi, serta tata kelola yang efektif untuk menghasilkan keunggulan strategis. Bryson (2018) menegaskan bahwa perencanaan strategis sektor publik yang efektif sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan, kompetensi organisasi, serta kemampuan adaptasi terhadap perubahan lingkungan. Selain itu, OECD (2019) juga menekankan bahwa kompetensi institusional pemerintah daerah, termasuk inovasi kebijakan dan manajemen pengetahuan, berperan penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan daya saing wilayah. Sejalan dengan itu, penelitian Farazmand (2017) menunjukkan bahwa kapasitas institusional dan kompetensi inti pemerintah menjadi faktor kunci dalam menciptakan tata kelola adaptif dan pembangunan berkelanjutan. Pemerintah daerah yang memiliki kompetensi inti kuat cenderung lebih responsif terhadap dinamika sosial-ekonomi, mampu meningkatkan efektivitas pelayanan publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan. Dengan demikian, penguatan core competence pemerintah daerah tidak hanya mendukung efektivitas perencanaan strategis, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam peningkatan daya saing daerah menuju pembangunan nasional jangka panjang.

Relevansi core competence pemerintah daerah dengan perencanaan strategis di Kabupaten Lebak terletak pada kemampuan pemerintah daerah dalam mengidentifikasi, mengelola, dan mengoptimalkan potensi lokal sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang efektif. Kompetensi inti tersebut mencakup kapasitas kelembagaan, kualitas sumber daya manusia aparatur, inovasi kebijakan, serta tata kelola pemerintahan yang adaptif. Dalam konteks RPJMD Kabupaten Lebak 2025-2029, penguatan kompetensi inti menjadi penting agar perencanaan pembangunan tidak hanya bersifat administratif, tetapi mampu mendorong transformasi ekonomi lokal, peningkatan pelayanan publik, dan penguatan daya saing wilayah secara berkelanjutan. Selain itu, integrasi core competence dalam perencanaan strategis juga memungkinkan pemerintah daerah lebih responsif terhadap dinamika pembangunan nasional dan global, termasuk agenda Indonesia Emas 2045. Dengan kompetensi inti yang kuat, pemerintah Kabupaten Lebak dapat lebih efektif menyelaraskan program pembangunan daerah dengan kebijakan nasional, meningkatkan kolaborasi lintas sektor, serta mengoptimalkan potensi ekonomi, sosial, dan budaya daerah. Hal ini pada akhirnya diharapkan mampu mempercepat pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat posisi Kabupaten Lebak dalam peta pembangunan regional dan nasional.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian core competence dalam sektor publik umumnya masih berfokus pada kapasitas kelembagaan, inovasi pelayanan publik, serta reformasi tata kelola pemerintahan. Bryson (2018) menekankan pentingnya kapasitas organisasi dan perencanaan strategis dalam meningkatkan kinerja sektor publik, sementara Farazmand

This is an open-access article under the CC–BY NC-SA license

Sawala
Jurnal Administrasi Negara
ISSN: 2598-4039 (Online)
ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright © 2026, Rusito, Jumanah
http://doi.org/10.30656/sawala.v14i1.zzf2rt61 to this article
Page 30-50
Volume 14 Number 1 (Juni) 2026

(2017) menyoroti peran kompetensi institusional dalam menciptakan tata kelola adaptif dan pembangunan berkelanjutan. OECD (2019; 2021; 2023) juga menegaskan bahwa inovasi kebijakan, manajemen pengetahuan, transformasi digital, serta kolaborasi antarlembaga menjadi faktor kunci peningkatan daya saing pemerintah daerah. Perspektif serupa disampaikan Osborne (2018) yang menekankan pentingnya penciptaan public value melalui inovasi layanan publik, serta Teece (2018) yang menyoroti dynamic capabilities sebagai dasar adaptasi organisasi dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis.

Lebih lanjut, Ansell dan Torfing (2021) menegaskan bahwa tata kelola kolaboratif dan co-creation menjadi strategi penting dalam revitalisasi sektor publik, sementara Bason (2018) menekankan inovasi sektor publik berbasis kolaborasi sebagai kunci peningkatan kualitas pelayanan dan efektivitas kebijakan. Kattel dan Mazzucato (2018) juga menunjukkan pentingnya kapasitas inovasi pemerintah dalam kebijakan pembangunan berbasis misi (*mission-oriented policy*), sedangkan Pollitt dan Bouckaert (2017) menyoroti reformasi manajemen publik sebagai upaya meningkatkan efektivitas tata kelola dan daya saing institusi pemerintah. Torfing (2019) menambahkan bahwa inovasi kolaboratif dalam sektor publik memperkuat kapasitas adaptif pemerintah dalam menghadapi kompleksitas pembangunan. Namun demikian, sebagian besar kajian tersebut masih bersifat konseptual atau berfokus pada level nasional dan organisasi publik secara umum, sehingga kajian mengenai integrasi core competence pemerintah daerah secara spesifik dalam dokumen perencanaan strategis pembangunan daerah masih relatif terbatas.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan (novelty) dengan menganalisis core competence pemerintah daerah secara kontekstual dalam kerangka perencanaan strategis daerah, khususnya RPJMD Kabupaten Lebak 2025-2029, serta keterkaitannya dengan agenda pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Pendekatan ini tidak hanya melihat kapasitas kelembagaan atau inovasi pelayanan publik secara parsial, tetapi menempatkan kompetensi inti pemerintah daerah sebagai faktor strategis dalam sinkronisasi kebijakan pusat-daerah, peningkatan daya saing wilayah, serta keberlanjutan pembangunan daerah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan empiris dalam pengembangan kajian manajemen strategis sektor publik, khususnya terkait penguatan kompetensi inti pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan jangka menengah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana core competence pemerintah daerah diintegrasikan dalam perencanaan strategis pembangunan, khususnya pada RPJMD Kabupaten Lebak 2025-2029, serta sejauh mana kompetensi inti tersebut mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, daya saing daerah, dan pencapaian tujuan pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat akademik berupa pengayaan kajian manajemen strategis sektor publik, serta manfaat praktis sebagai masukan bagi pemerintah daerah dalam memperkuat kapasitas kelembagaan, inovasi kebijakan, dan perencanaan strategis yang efektif guna mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis core competence pemerintah daerah dalam perencanaan strategis, khususnya pada RPJMD Kabupaten Lebak 2025-2029. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan

This is an open-access article under the CC–BY NC-SA license

Sawala
Jurnal Administrasi Negara
ISSN: 2598-4039 (Online)
ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright © 2026, Rusito, Jumanah
http://doi.org/10.30656/sawala.v14i1.zzf2rt61 to this article
Page 30-50
Volume 14 Number 1 (Juni) 2026

memahami secara mendalam kapasitas kelembagaan, inovasi kebijakan, serta integrasi kompetensi inti pemerintah daerah dalam proses perencanaan strategis pembangunan. Sumber data penelitian meliputi dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD, Renstra OPD), regulasi terkait, laporan kinerja pemerintah daerah, serta literatur akademik yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, telaah literatur, dan analisis kebijakan publik yang berkaitan dengan perencanaan strategis daerah. Analisis difokuskan pada identifikasi dimensi core competence pemerintah daerah, termasuk kemampuan mengelola sumber daya, inovasi kebijakan, tata kelola pemerintahan, serta kontribusi terhadap peningkatan pelayanan publik dan daya saing daerah. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh gambaran komprehensif mengenai integrasi kompetensi inti dalam kebijakan perencanaan pembangunan daerah.

Analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2019) yang meliputi tiga tahap utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan memfokuskan data relevan dengan konsep core competence dan perencanaan strategis daerah. Selanjutnya, data disajikan secara sistematis dalam bentuk narasi analitis dan tabel tematik untuk memudahkan interpretasi. Tahap akhir dilakukan penarikan kesimpulan secara bertahap dengan verifikasi berkelanjutan guna memastikan validitas temuan penelitian terkait peran kompetensi inti pemerintah daerah dalam mendukung efektivitas perencanaan strategis pembangunan.

HASIL DAN DISKUSI

Visi pembangunan Kabupaten Lebak dalam RPJMD 2025–2029 adalah "Mewujudkan Kabupaten Lebak yang RUHAY (Rukun, Unggul, Hegar, Aman, dan Yakin)", yang menekankan kebersamaan, daya saing daerah, kualitas sumber daya manusia, keamanan, serta arah pembangunan yang konsisten dan inovatif. Visi tersebut dijabarkan ke dalam lima misi utama, antara lain penguatan tata kelola pemerintahan berbasis digital, hilirisasi ekonomi lokal berkelanjutan, peningkatan kualitas SDM yang unggul dan berkeadilan, pembangunan infrastruktur terintegrasi, serta harmonisasi lingkungan dan mitigasi bencana. Dalam perspektif core competence, visi dan misi ini mencerminkan upaya pemerintah daerah memperkuat kapasitas kelembagaan, inovasi kebijakan, serta pengelolaan sumber daya sebagai dasar keunggulan pembangunan daerah. Perda No. 4/2025).

Strategi pembangunan daerah diformulasikan sebagai langkah komprehensif untuk mengoptimalkan sumber daya, memperkuat pelayanan dasar, serta meningkatkan daya saing ekonomi dan kualitas SDM secara bertahap. Tahapan pembangunan RPJMD menunjukkan fokus pada penguatan SDM, percepatan akses layanan dasar melalui infrastruktur, peningkatan inovasi ekonomi, serta pemantapan pembangunan berkelanjutan Hal ini menunjukkan relevansi core competence dalam perencanaan strategis, khususnya kemampuan pemerintah daerah dalam sensing, adapting, dan transforming kebijakan pembangunan sesuai kebutuhan daerah. Program prioritas daerah selanjutnya diarahkan pada pembangunan infrastruktur konektivitas desa, peningkatan mutu pelayanan kesehatan, penguatan ekonomi lokal, digitalisasi layanan publik, serta pengelolaan lingkungan berkelanjutan. Program tersebut disusun secara integratif dan kolaboratif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta daya saing wilayah. (Perda No. 4/2025) Dengan demikian, RPJMD Kabupaten Lebak 2025-2029 mencerminkan implementasi core competence pemerintah daerah dalam perencanaan strategis, yaitu melalui penguatan inovasi, kapasitas institusional, serta optimalisasi potensi

This is an open-access article under the CC–BY NC-SA license

Sawala
Jurnal Administrasi Negara
ISSN: 2598-4039 (Online)
ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright © 2026, Rusito, Jumanah
http://doi.org/10.30656/sawala.v14i1.zzf2rt61 to this article
Page 30-50
Volume 14 Number 1 (Juni) 2026

lokal guna mendukung pembangunan daerah berkelanjutan dan selaras dengan agenda pembangunan nasional.

Untuk memperkuat pemahaman mengenai implementasi core competence pemerintah daerah dalam perencanaan strategis, diperlukan gambaran konkret terkait sektor pembangunan, cakupan wilayah, serta program lintas sektor yang menjadi prioritas RPJMD Kabupaten Lebak 2025–2029. Tabel berikut menyajikan data sektor layanan, program strategis, dan cakupan pembangunan daerah sebagai bentuk implementasi strategi pembangunan berbasis potensi lokal dan peningkatan daya saing wilayah.

Tabel 1.
Data Sektor Layanan, Cakupan Wilayah, dan Program Lintas Sektor

Dimensi Data	Sektor/Program Utama RPJMD Lebak 2025-2029	Data Angka / Indikator Pendukung
Sektor layanan/pembangunan	Ekonomi lokal, SDM, infrastruktur, tata kelola pemerintahan, lingkungan hidup	5 sektor prioritas pembangunan
Program strategis daerah	Proyek infrastruktur, ekonomi lokal, layanan publik	15 proyek strategis daerah
Cakupan wilayah pembangunan	Desa produktif, wilayah ekonomi lokal, kawasan pariwisata, sektor pertanian	Seluruh wilayah kabupaten (desa-kecamatan)

Sumber : Baperida Kabupaten Lebak, 2025

Data pada tabel 1. menunjukkan bahwa RPJMD Kabupaten Lebak 2025–2029 menitikberatkan pembangunan pada lima sektor prioritas, yaitu ekonomi lokal, pengembangan sumber daya manusia, infrastruktur, tata kelola pemerintahan, dan lingkungan hidup sebagai basis pembangunan daerah. Keberadaan sekitar 15 proyek strategis daerah serta cakupan pembangunan yang menyasar seluruh wilayah kabupaten, mulai dari desa produktif, kawasan ekonomi lokal, pariwisata, hingga sektor pertanian, menunjukkan adanya pendekatan pembangunan yang terpadu dan lintas sektor. Hal ini mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam memperkuat kapasitas perencanaan strategis melalui optimalisasi potensi wilayah, peningkatan pelayanan publik, serta penguatan daya saing daerah secara berkelanjutan.

Berdasarkan data RPJMD Kabupaten Lebak 2025–2029, program strategis daerah menunjukkan keterkaitan yang kuat dengan penguatan kompetensi inti (core competence) pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pembangunan. Dalam perspektif teori core competence, kompetensi inti pemerintah daerah tidak hanya dipahami sebagai kemampuan administratif, tetapi juga sebagai kapasitas institusional yang terintegrasi dalam mengelola sumber daya, menciptakan inovasi kebijakan, serta membangun kolaborasi pembangunan secara berkelanjutan. Lima sektor prioritas pembangunan yang meliputi ekonomi lokal, sumber daya manusia, infrastruktur, tata kelola pemerintahan, dan lingkungan hidup memperlihatkan adanya fokus strategis pemerintah daerah dalam membangun kemampuan organisasi yang khas dan berdaya saing.

Pada sektor ekonomi lokal, program pengembangan desa produktif, kawasan ekonomi lokal, sektor pertanian, dan pariwisata menunjukkan kompetensi inti pemerintah daerah dalam

This is an open-access article under the CC–BY NC-SA license

Sawala
Jurnal Administrasi Negara
ISSN: 2598-4039 (Online)
ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright © 2026, Rusito, Jumanah
http://doi.org/10.30656/sawala.v14i1.zzf2rt61 to this article
Page 30-50
Volume 14 Number 1 (Juni) 2026

mengelola potensi unggulan berbasis karakteristik wilayah. Pemerintah daerah tidak hanya menjalankan fungsi regulatif, tetapi juga memperlihatkan kemampuan dalam membangun jejaring ekonomi masyarakat, memperkuat pemberdayaan UMKM, serta meningkatkan daya saing ekonomi lokal. Kompetensi ini menjadi penting karena mencerminkan kemampuan pemerintah dalam mengintegrasikan potensi sumber daya lokal dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Dalam praktiknya, pengembangan ekonomi lokal tersebut memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam menciptakan model pembangunan berbasis keunggulan wilayah yang sulit ditiru oleh daerah lain. Pada aspek sumber daya manusia (SDM), program strategis yang diarahkan pada peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan mencerminkan kompetensi inti dalam pembangunan manusia. Pemerintah daerah menunjukkan kemampuan dalam menyusun kebijakan pelayanan dasar yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini terlihat dari orientasi pembangunan yang tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui penguatan akses pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Kompetensi inti yang terbentuk adalah kemampuan birokrasi dalam mengelola pelayanan publik secara efektif, responsif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Di bidang infrastruktur, keberadaan 15 proyek strategis daerah menunjukkan kapasitas pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan jangka menengah yang terarah. Pembangunan infrastruktur jalan, konektivitas wilayah, irigasi pertanian, serta fasilitas pelayanan publik mencerminkan kemampuan pemerintah dalam mengintegrasikan kebutuhan pembangunan antarwilayah. Kompetensi inti yang berkembang dari sektor ini adalah kemampuan koordinasi lintas sektor dan kemampuan manajerial dalam mengelola proyek pembangunan berskala besar. Infrastruktur tidak hanya dipandang sebagai pembangunan fisik, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk memperkuat aksesibilitas ekonomi, mempercepat distribusi layanan publik, dan mengurangi kesenjangan wilayah. Pada sektor tata kelola pemerintahan, RPJMD Lebak memperlihatkan adanya penguatan kompetensi inti dalam aspek governance capacity. Pemerintah daerah berupaya meningkatkan kualitas birokrasi melalui digitalisasi layanan publik, penguatan akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa core competence pemerintah daerah terletak pada kemampuan menciptakan sistem administrasi yang efisien, transparan, dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis. Dalam teori core competence, kemampuan organisasi untuk terus belajar dan berinovasi menjadi faktor penting dalam menciptakan keunggulan institusional yang berkelanjutan.

Sementara itu, fokus pada sektor lingkungan hidup memperlihatkan kompetensi pemerintah daerah dalam pembangunan berkelanjutan. Pengelolaan lingkungan, konservasi sumber daya alam, dan pengembangan kawasan berbasis keberlanjutan menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan ekologis dalam kebijakan pembangunan. Kompetensi ini menjadi sangat relevan karena pembangunan wilayah yang berkelanjutan membutuhkan kapasitas institusional yang mampu menjaga keseimbangan antara eksploitasi sumber daya dan perlindungan lingkungan. Cakupan pembangunan yang meliputi seluruh wilayah kabupaten hingga tingkat desa dan kecamatan menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki kompetensi inti dalam membangun pendekatan pembangunan berbasis wilayah (territorial development approach). Pemerintah daerah mampu mengidentifikasi kebutuhan lokal secara spesifik dan menerjemahkannya ke

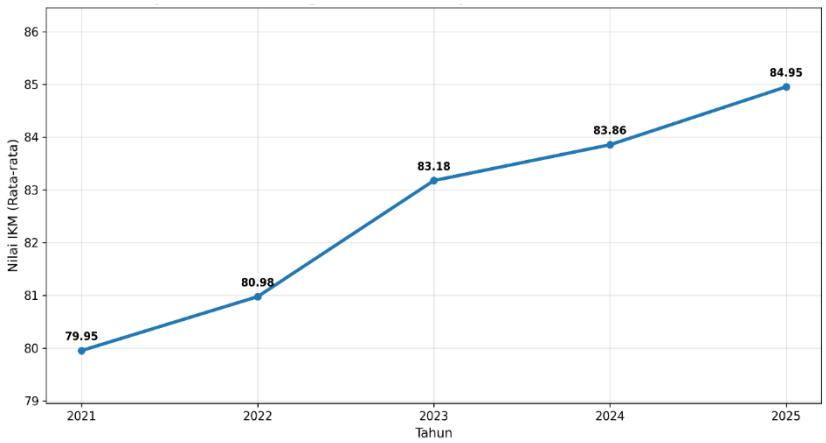
This is an open-access article under the CC–BY NC-SA license

Sawala
Jurnal Administrasi Negara
ISSN: 2598-4039 (Online)
ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright © 2026, Rusito, Jumanah
http://doi.org/10.30656/sawala.v14i1.zzf2rt61 to this article
Page 30-50
Volume 14 Number 1 (Juni) 2026

dalam program strategis yang sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah. Hal ini memperlihatkan kemampuan adaptif dan integratif pemerintah daerah dalam mengelola pembangunan secara inklusif.

Untuk melihat capaian kualitas pelayanan publik sebagai bagian dari penguatan core competence pemerintah daerah dalam perencanaan strategis, diperlukan gambaran tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja perangkat daerah. Grafik berikut menyajikan tren Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Lebak tahun 2021–2025 sebagai indikator peningkatan kualitas layanan publik dan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah.

Grafik 2
Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah
Kabupaten Lebak Tahun 2021-2025



Sumber : Baperida Kabupaten Lebak, 2026

Berdasarkan grafik tren rata-rata IKM 2021–2025, terlihat adanya kenaikan konsisten dari tahun ke tahun. Rata-rata IKM meningkat dari sekitar 79,95 (2021) menjadi 84,95 (2025). Lonjakan paling menonjol terjadi pada 2022 ke 2023, yang menunjukkan adanya perbaikan pelayanan yang cukup signifikan pada periode tersebut. Pada heatmap IKM OPD, tampak bahwa mayoritas perangkat daerah mengalami pergeseran warna menuju lebih terang pada 2023–2025, yang menandakan peningkatan kualitas pelayanan secara umum. Nilai IKM di tahun 2025 relatif lebih merata dan tinggi dibanding 2021–2022, menandakan peningkatan yang lebih stabil serta penguatan standar layanan di berbagai OPD. Secara keseluruhan, grafik menunjukkan adanya tren positif peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kabupaten Lebak selama 5 tahun terakhir. Meski begitu, heatmap juga memperlihatkan masih ada beberapa OPD yang pada awal periode (2021–2022) berada pada nilai lebih rendah, sehingga tetap perlu dilakukan penguatan pembinaan, evaluasi berkala, dan inovasi layanan agar peningkatan dapat lebih merata di seluruh perangkat daerah.

Untuk memperjelas implementasi core competence pemerintah daerah dalam perencanaan strategis RPJMD Kabupaten Lebak 2025-2029, diperlukan gambaran terkait inovasi kebijakan, kualitas SDM, pemanfaatan teknologi, serta keunikan program pembangunan daerah. Tabel berikut menyajikan data tersebut sebagai indikator penguatan kapasitas kelembagaan dan strategi pembangunan berbasis potensi lokal.

This is an open-access article under the CC–BY NC-SA license

Sawala
Jurnal Administrasi Negara
ISSN: 2598-4039 (Online)
ISSN: 2302-2221 (Print)

Copyright © 2026, Rusito, Jumanah
http://doi.org/10.30656/sawala.v14i1.zzf2rt61 to this article
Page 30-50
Volume 14 Number 1 (Juni) 2026

Tabel 2
Data Inovasi, SDM Kompeten, Teknologi dan Keunikan Kebijakan/Program Kabupaten Lebak 2025–2029

Core Competence	Data RPJMD Lebak 2025–2029	Indikator/Angka Pendukung	Makna Strategis
Inovasi kebijakan/program	15 proyek strategis daerah termasuk pembangunan jalan poros desa produktif	Fokus konektivitas desa dan ekonomi lokal	Program diarahkan mempercepat kesejahteraan masyarakat dan penguatan ekonomi daerah
SDM kompeten	Peningkatan kualitas SDM unggul dan kesetaraan sosial menjadi misi RPJMD	Program pendidikan, peningkatan kompetensi masyarakat	SDM diposisikan sebagai faktor utama daya saing daerah
Teknologi / Digitalisasi	Layanan publik berbasis digitalisasi dalam tata kelola pemerintahan	Reformasi birokrasi dan layanan publik digital	Mendukung efisiensi pelayanan dan inovasi pemerintahan
Keunikan kebijakan daerah	Visi pembangunan "Lebak RUHAY" (Rukun, Unggul, Hegar, Aman, Yakin)	Integrasi ekonomi lokal, infrastruktur, SDM, dan lingkungan	Menjadi identitas strategi pembangunan daerah berbasis potensi lokal
Infrastruktur strategis	Penanganan 30-50 km/tahun dari 588 ruas jalan desa (1.968 km total)	Konektivitas wilayah dan ekonomi desa	Mendukung akses pasar, logistik, pariwisata, dan layanan publik

Sumber : Baperida Kabupaten Lebak, 2025

Berdasarkan data RPJMD Kabupaten Lebak 2025–2029, terlihat bahwa program strategis daerah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembangunan, tetapi juga sebagai sarana penguatan kompetensi inti (core competence) pemerintah daerah. Dalam teori core competence yang dikemukakan Prahalad dan Hamel, organisasi yang unggul adalah organisasi yang memiliki kemampuan khas, terintegrasi, sulit ditiru, dan mampu menciptakan nilai strategis jangka panjang. Dalam konteks pemerintahan daerah, kompetensi inti tersebut tercermin melalui kemampuan pemerintah dalam merancang kebijakan inovatif, membangun kapasitas sumber daya manusia, memanfaatkan teknologi, mengembangkan identitas pembangunan daerah, serta memperkuat infrastruktur strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pada aspek inovasi kebijakan dan program, keberadaan 15 proyek strategis daerah

This is an open-access article under the CC–BY NC-SA license

Sawala
Jurnal Administrasi Negara
ISSN: 2598-4039 (Online)
ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright © 2026, Rusito, Jumanah
http://doi.org/10.30656/sawala.v14i1.zzf2rt61 to this article
Page 30-50
Volume 14 Number 1 (Juni) 2026

termasuk pembangunan jalan poros desa produktif menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam menciptakan kebijakan pembangunan yang berbasis kebutuhan lokal. Fokus pada konektivitas desa dan penguatan ekonomi lokal memperlihatkan bahwa pemerintah daerah memiliki kompetensi inti dalam mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Jalan poros desa tidak hanya berfungsi sebagai sarana transportasi, tetapi juga menjadi instrumen untuk mempercepat distribusi hasil pertanian, meningkatkan akses pasar UMKM, dan membuka konektivitas kawasan wisata lokal. Hal ini menunjukkan bahwa inovasi kebijakan pemerintah daerah bersifat strategis karena mampu menghubungkan sektor infrastruktur dengan penguatan ekonomi masyarakat secara langsung. Dalam perspektif core competence, kemampuan mengintegrasikan berbagai sektor pembangunan tersebut merupakan bentuk kapasitas organisasi yang bernilai tinggi dan sulit ditiru oleh daerah lain. Pada dimensi sumber daya manusia (SDM) kompeten, RPJMD Lebak menempatkan peningkatan kualitas SDM unggul dan kesetaraan sosial sebagai bagian dari misi pembangunan daerah. Program pendidikan, pelatihan keterampilan masyarakat, dan peningkatan kapasitas tenaga kerja menunjukkan bahwa pemerintah daerah memahami SDM sebagai inti daya saing daerah. Kompetensi inti pemerintah daerah dalam hal ini terlihat pada kemampuan membangun human capital development secara berkelanjutan. Pemerintah daerah tidak hanya menyediakan layanan pendidikan formal, tetapi juga menciptakan program pemberdayaan masyarakat yang relevan dengan kebutuhan ekonomi lokal. Dalam praktiknya, peningkatan kompetensi masyarakat akan memperkuat produktivitas daerah, mengurangi ketimpangan sosial, dan menciptakan masyarakat yang adaptif terhadap perubahan ekonomi dan teknologi. Dengan demikian, pembangunan SDM menjadi bentuk nyata penerapan teori core competence karena pemerintah daerah membangun keunggulan melalui penguatan kapasitas manusia sebagai aset strategis utama.

Pada aspek teknologi dan digitalisasi, kebijakan layanan publik berbasis digitalisasi menunjukkan adanya transformasi kompetensi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan modern. Reformasi birokrasi dan digitalisasi layanan publik memperlihatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan publik. Kompetensi inti yang terbentuk adalah kemampuan institusional dalam mengelola sistem pemerintahan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi. Digitalisasi layanan memungkinkan pemerintah daerah mempercepat proses administrasi, meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan publik, serta mengurangi hambatan birokrasi konvensional. Dalam konteks teori core competence, penggunaan teknologi menjadi faktor strategis karena menciptakan nilai tambah pelayanan yang sulit ditiru apabila didukung oleh kapasitas birokrasi yang kuat dan budaya organisasi yang inovatif.

Keunikan kebijakan daerah melalui visi pembangunan "Lebak RUHAY" (Rukun, Unggul, Hegar, Aman, Yakin) juga menunjukkan adanya identitas kompetensi inti yang khas. Visi ini tidak hanya menjadi slogan pembangunan, tetapi mencerminkan pendekatan pembangunan daerah berbasis potensi lokal dan integrasi antar sektor. Penggabungan aspek ekonomi lokal, infrastruktur, SDM, dan lingkungan hidup menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membangun model pembangunan yang holistik dan kontekstual. Dalam teori core competence, identitas strategis semacam ini menjadi penting karena membedakan karakter pembangunan suatu daerah dengan daerah lain. Pemerintah daerah Lebak membangun

This is an open-access article under the CC–BY NC-SA license

Sawala
Jurnal Administrasi Negara
ISSN: 2598-4039 (Online)
ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright © 2026, Rusito, Jumanah
http://doi.org/10.30656/sawala.v14i1.zzf2rt61 to this article
Page 30-50
Volume 14 Number 1 (Juni) 2026

keunggulan kompetitif melalui pemanfaatan karakteristik lokal sebagai basis pembangunan berkelanjutan.

Sementara itu, pada aspek infrastruktur strategis, target penanganan 30–50 km jalan per tahun dari total 588 ruas jalan desa sepanjang 1.968 km menunjukkan kapasitas pemerintah daerah dalam manajemen pembangunan wilayah secara sistematis. Infrastruktur jalan desa menjadi faktor penting dalam memperkuat konektivitas ekonomi dan pelayanan publik. Kompetensi inti pemerintah daerah terlihat pada kemampuan perencanaan, pengelolaan anggaran, koordinasi lintas sektor, serta pengawasan pembangunan infrastruktur secara berkelanjutan. Dampak strategisnya tidak hanya meningkatkan mobilitas masyarakat, tetapi juga mempercepat akses logistik, distribusi hasil pertanian, pengembangan pariwisata, dan pemerataan pembangunan antarwilayah. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur menjadi instrumen utama dalam memperkuat kapasitas kompetitif daerah. Secara keseluruhan, data RPJMD Kabupaten Lebak 2025–2029 menunjukkan bahwa program strategis daerah memiliki hubungan yang sangat erat dengan peningkatan kompetensi inti pemerintah daerah. Program-program tersebut memperlihatkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengintegrasikan inovasi kebijakan, pengembangan SDM, digitalisasi pemerintahan, identitas pembangunan berbasis lokal, dan pembangunan infrastruktur sebagai satu kesatuan strategi pembangunan daerah. Hal ini memperkuat penerapan teori core competence dalam praktik pemerintahan, di mana keunggulan daerah dibangun melalui kapasitas organisasi publik yang adaptif, inovatif, kolaboratif, dan berorientasi pada penciptaan nilai publik yang berkelanjutan.

Dalam konteks perencanaan strategis pemerintah daerah, konsep core competence menjadi penting karena mencerminkan kemampuan institusi dalam memperluas akses pembangunan lintas sektor, meningkatkan nilai pelayanan publik bagi masyarakat, serta menciptakan keunggulan yang berkelanjutan. Kompetensi inti memungkinkan pemerintah daerah mengoptimalkan potensi lokal, mendorong inovasi kebijakan, dan meningkatkan kualitas layanan sehingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Selain itu, kompetensi yang berbasis pengalaman kelembagaan, pengetahuan kolektif, dan integrasi sumber daya menjadikan keunggulan daerah tidak mudah ditiru, sehingga mendukung daya saing dan keberlanjutan pembangunan daerah, termasuk dalam konteks perencanaan strategis Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Untuk memahami secara lebih mendalam bagaimana kompetensi inti pemerintah daerah terbentuk dan berkontribusi terhadap keberhasilan perencanaan strategis pembangunan, pembahasan selanjutnya menguraikan tiga aspek utama core competence, yaitu kemampuan memperluas akses pembangunan lintas sektor, kontribusi terhadap nilai pelayanan publik, serta keunggulan institusional yang sulit ditiru (Hamel dan Prahalad, 1990).

Aspek memberikan akses ke berbagai pasar (*Access to a wide variety of markets*)

Aspek *access to a wide variety of markets* dalam dimensi core competence pada perencanaan strategis dapat dimaknai sebagai kemampuan organisasi, termasuk pemerintah daerah, dalam memperluas jangkauan pelayanan, sektor pembangunan, dan peluang ekonomi melalui integrasi sumber daya dan inovasi kebijakan. Teece (2018) menekankan bahwa organisasi yang memiliki dynamic capabilities mampu mengidentifikasi peluang baru dan memperluas cakupan aktivitas strategis melalui kemampuan sensing dan seizing terhadap perubahan lingkungan. Sementara itu, Bryson (2018) menyatakan bahwa perencanaan strategis sektor publik harus mampu membuka akses lintas sektor dan kolaborasi multipihak untuk meningkatkan nilai publik dan efektivitas kebijakan. Selain itu, OECD (2019) menegaskan bahwa kapasitas pemerintah daerah

This is an open-access article under the CC–BY NC-SA license

Sawala
Jurnal Administrasi Negara
ISSN: 2598-4039 (Online)
ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright © 2026, Rusito, Jumanah
http://doi.org/10.30656/sawala.v14i1.zzf2rt61 to this article
Page 30-50
Volume 14 Number 1 (Juni) 2026

dalam inovasi kebijakan, digitalisasi layanan, dan kolaborasi antar sektor menjadi faktor penting dalam memperluas akses pembangunan serta meningkatkan daya saing wilayah secara berkelanjutan.

Aspek access to a wide variety of markets dalam dimensi core competency pada konteks perencanaan strategis daerah dapat dimaknai sebagai kemampuan pemerintah daerah dalam memperluas jangkauan pembangunan lintas sektor, wilayah, dan kelompok masyarakat melalui optimalisasi potensi lokal serta kolaborasi multipihak. Teece (2018) melalui konsep dynamic capabilities menekankan bahwa organisasi yang adaptif mampu mengidentifikasi peluang baru (sensing), memanfaatkan peluang tersebut (seizing), serta menyesuaikan strategi pembangunan secara berkelanjutan (transforming). Dalam sektor publik, Bryson (2018) juga menegaskan bahwa perencanaan strategis daerah harus mampu membuka akses pembangunan lintas sektor melalui integrasi kebijakan, kemitraan, dan inovasi tata kelola guna meningkatkan efektivitas pembangunan dan nilai publik.

Selain itu, OECD (2019) menyoroti pentingnya kapasitas pemerintah daerah dalam inovasi kebijakan, digitalisasi pelayanan, dan kolaborasi lintas sektor sebagai faktor kunci dalam memperluas akses pembangunan dan meningkatkan daya saing wilayah. Osborne (2018) menambahkan bahwa organisasi sektor publik yang berorientasi pada public value perlu mengembangkan kompetensi dalam membangun jejaring, inovasi layanan, dan pemanfaatan sumber daya secara terpadu agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih luas. Dengan demikian, aspek akses ke berbagai "pasar" dalam konteks daerah tidak hanya terkait ekonomi, tetapi juga mencakup perluasan akses pelayanan publik, pembangunan wilayah, serta peningkatan kesempatan ekonomi masyarakat sebagai bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan.

Pendekatan creating shared value (CSV) juga dikembangkan lebih lanjut dalam literatur manajemen strategis menegaskan bahwa organisasi, termasuk sektor publik, perlu membuka akses pasar dan pembangunan melalui penciptaan nilai ekonomi sekaligus sosial. Konsep ini menekankan pentingnya keterlibatan pemangku kepentingan, inovasi sosial, serta integrasi kepentingan ekonomi dan masyarakat sebagai strategi untuk memperluas peluang pembangunan lintas sektor dan wilayah (Kim, 2020; Yang, 2020). Perspektif tersebut relevan dalam perencanaan strategis daerah karena memperkuat gagasan bahwa optimalisasi potensi lokal dan kolaborasi multipihak dapat memperluas akses pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Selanjutnya, kajian mengenai Balanced Scorecard dalam sektor publik menunjukkan bahwa organisasi pemerintah perlu mengintegrasikan tujuan strategis, indikator kinerja, dan kepentingan pemangku kepentingan secara simultan agar strategi pembangunan dapat berjalan efektif. Pendekatan ini memungkinkan pemerintah daerah menghubungkan visi pembangunan dengan implementasi kebijakan lintas sektor serta memperkuat komunikasi internal dan eksternal organisasi, sehingga akses pembangunan terhadap berbagai kelompok masyarakat dapat diperluas (De Freitas, 2021; Madsen, 2025). Dengan demikian, penguatan kompetensi inti pemerintah daerah tidak hanya terletak pada sumber daya, tetapi juga pada kemampuan mengintegrasikan strategi, pengukuran kinerja, dan tata kelola kolaboratif.

Lebih lanjut, literatur mengenai public value governance dan kolaborasi multiaktor menegaskan bahwa penciptaan nilai publik dalam pembangunan daerah semakin bergantung pada jaringan kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Pendekatan ini

This is an open-access article under the CC–BY NC-SA license

Sawala
Jurnal Administrasi Negara
ISSN: 2598-4039 (Online)
ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright © 2026, Rusito, Jumanah
http://doi.org/10.30656/sawala.v14i1.zzf2rt61 to this article
Page 30-50
Volume 14 Number 1 (Juni) 2026

menunjukkan bahwa akses pembangunan lintas sektor dapat diperluas melalui mekanisme ko-kreasi kebijakan, inovasi layanan publik, serta penguatan kapasitas institusi adaptif dalam merespons perubahan lingkungan strategis (Rizun et al., 2023; studi governance publik 2024). Hal ini memperkuat pandangan bahwa kompetensi inti pemerintah daerah mencakup kemampuan membangun jejaring kolaborasi, inovasi tata kelola, dan integrasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas pembangunan dan nilai publik.

Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa RPJMD Kabupaten Lebak 2025-2029 menekankan pembangunan pada lima sektor prioritas serta sekitar 15 proyek strategis yang mencakup seluruh wilayah kabupaten. Kondisi ini mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperluas akses pembangunan lintas sektor dan wilayah, yang sejalan dengan dimensi core competence berupa access to a wide variety of markets. Dalam konteks pemerintah daerah, "pasar" tidak hanya dimaknai sebagai pasar ekonomi, tetapi juga akses terhadap pelayanan publik, pengembangan sektor unggulan, serta kesempatan pembangunan bagi masyarakat di berbagai wilayah. Pendekatan pembangunan lintas sektor yang mencakup ekonomi lokal, SDM, infrastruktur, tata kelola pemerintahan, dan lingkungan hidup menunjukkan adanya integrasi kebijakan strategis yang memungkinkan optimalisasi potensi daerah secara lebih luas. Hal ini mencerminkan kapasitas pemerintah Kabupaten Lebak dalam mengembangkan kompetensi inti melalui perluasan akses pembangunan, peningkatan pelayanan publik, serta penguatan daya saing wilayah. Dengan demikian, aspek access to a wide variety of markets dalam core competence terlihat dari kemampuan pemerintah daerah membuka peluang ekonomi, memperluas layanan publik, dan meningkatkan keterhubungan wilayah sebagai bagian dari perencanaan strategis pembangunan daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan sejumlah kajian sebelumnya yang menekankan pentingnya kapasitas pemerintah daerah dalam memperluas akses pembangunan lintas sektor sebagai bagian dari core competence dalam perencanaan strategis. Bryson (2018) menunjukkan bahwa perencanaan strategis sektor publik yang efektif menuntut integrasi kebijakan lintas sektor dan kolaborasi multipihak untuk meningkatkan nilai publik. OECD (2019) juga menegaskan bahwa inovasi kebijakan, digitalisasi pelayanan, dan penguatan jejaring kelembagaan menjadi faktor kunci dalam memperluas akses pembangunan daerah. Persamaan dengan hasil penelitian ini terletak pada pentingnya integrasi sektor pembangunan dan inovasi tata kelola sebagai strategi meningkatkan daya saing daerah.

Namun demikian, penelitian lain menekankan dimensi tambahan yang lebih spesifik pada aspek adaptabilitas organisasi. Teece (2018) melalui konsep dynamic capabilities menyoroti pentingnya kemampuan organisasi dalam sensing, seizing, dan transforming peluang strategis sebagai prasyarat perluasan akses pembangunan. Sementara Osborne (2018) menekankan pendekatan public value management, yaitu kemampuan pemerintah membangun kolaborasi dan inovasi pelayanan publik untuk menciptakan nilai publik yang lebih luas. Perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada fokus empiris, di mana penelitian ini lebih menitikberatkan pada integrasi kompetensi inti dalam dokumen perencanaan strategis daerah (RPJMD) sebagai instrumen kebijakan konkret.

Selain itu, penelitian Ansell dan Torfing (2017) menyoroti pentingnya inovasi kolaboratif dalam tata kelola pemerintahan untuk memperluas akses pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Temuan tersebut memiliki kesamaan dengan hasil penelitian ini yang menunjukkan pentingnya integrasi sektor ekonomi, SDM, infrastruktur, dan tata kelola dalam

This is an open-access article under the CC–BY NC-SA license

Sawala
Jurnal Administrasi Negara
ISSN: 2598-4039 (Online)
ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright © 2026, Rusito, Jumanah
http://doi.org/10.30656/sawala.v14i1.zzf2rt61 to this article
Page 30-50
Volume 14 Number 1 (Juni) 2026

RPJMD Kabupaten Lebak. Perbedaannya, studi ini memberikan kontribusi empiris yang lebih kontekstual pada tingkat pemerintah daerah, khususnya dalam melihat core competence sebagai faktor strategis dalam sinkronisasi kebijakan nasional dan daerah serta penguatan daya saing wilayah secara berkelanjutan.

Aspek memberikan kontribusi signifikan terhadap nilai/manfaat pelanggan (Contribution to customer value)

Aspek contribution to customer value dalam dimensi core competency pada perencanaan strategis dapat dimaknai sebagai kemampuan organisasi, termasuk pemerintah daerah, dalam menciptakan nilai nyata bagi masyarakat melalui peningkatan kualitas layanan publik, inovasi kebijakan, serta efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Osborne (2018) menekankan bahwa organisasi sektor publik harus berorientasi pada public value, yaitu menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat melalui pelayanan yang responsif, inovatif, dan kolaboratif. Selain itu, Bryson (2018) menyatakan bahwa perencanaan strategis sektor publik perlu diarahkan pada peningkatan kinerja pelayanan publik, kepuasan masyarakat, serta penciptaan nilai sosial sebagai indikator keberhasilan kebijakan.

Sejalan dengan itu, OECD (2019) menegaskan bahwa inovasi kebijakan, digitalisasi pelayanan publik, dan penguatan kapasitas institusional pemerintah daerah merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan masyarakat. Teece (2018) melalui perspektif dynamic capabilities juga menekankan pentingnya kemampuan organisasi dalam beradaptasi terhadap kebutuhan pemangku kepentingan agar nilai pelayanan tetap relevan dan berkelanjutan. Dengan demikian, kontribusi terhadap nilai pelanggan dalam konteks pemerintah daerah tidak hanya terkait efisiensi layanan, tetapi juga mencakup peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik, serta keberlanjutan pembangunan daerah.

Aspek contribution to customer value dalam dimensi core competency pada konteks perencanaan strategis daerah dapat dimaknai sebagai kemampuan pemerintah daerah dalam menciptakan nilai publik melalui peningkatan kualitas pelayanan, efektivitas kebijakan, serta kesejahteraan masyarakat. Osborne (2018) menegaskan bahwa organisasi sektor publik perlu berorientasi pada public value, yaitu menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat melalui layanan yang responsif, inovatif, dan kolaboratif. Bryson (2018) juga menekankan bahwa perencanaan strategis pemerintah daerah harus berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik, kepuasan masyarakat, dan pencapaian nilai sosial sebagai indikator keberhasilan kebijakan pembangunan.

Selain itu, OECD (2019) menyoroti bahwa inovasi kebijakan, transformasi digital layanan publik, serta penguatan kapasitas institusional pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas layanan dan kepercayaan masyarakat. Teece (2018) melalui perspektif dynamic capabilities menambahkan bahwa organisasi yang adaptif terhadap kebutuhan pemangku kepentingan akan lebih mampu menciptakan nilai berkelanjutan melalui inovasi kebijakan dan pelayanan. Dengan demikian, kontribusi terhadap nilai pelanggan dalam konteks pemerintah daerah tidak hanya berkaitan dengan efisiensi layanan, tetapi juga peningkatan kualitas hidup masyarakat, daya saing daerah, dan keberlanjutan pembangunan.

Ansell dan Torfing (2021) menekankan bahwa tata kelola publik berbasis co-creation menjadi pendekatan penting dalam meningkatkan nilai publik melalui keterlibatan aktif masyarakat, sektor swasta, dan pemangku kepentingan lainnya. Kolaborasi tersebut memungkinkan

This is an open-access article under the CC–BY NC-SA license

Sawala
Jurnal Administrasi Negara
ISSN: 2598-4039 (Online)
ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright © 2026, Rusito, Jumanah
http://doi.org/10.30656/sawala.v14i1.zzf2rt61 to this article
Page 30-50
Volume 14 Number 1 (Juni) 2026

pemerintah daerah menghasilkan kebijakan dan layanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat sehingga kualitas pelayanan publik, legitimasi kebijakan, dan dampak pembangunan dapat meningkat secara berkelanjutan. Dalam konteks perencanaan strategis daerah, pendekatan ini memperkuat orientasi pada penciptaan manfaat nyata bagi masyarakat sebagai indikator keberhasilan pembangunan.

Selanjutnya, Mazzucato (2021) melalui perspektif mission-oriented public policy menegaskan bahwa pemerintah memiliki peran strategis dalam menciptakan nilai publik melalui kebijakan inovatif yang berorientasi pada penyelesaian masalah sosial dan ekonomi. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kontribusi terhadap nilai masyarakat tidak hanya berasal dari efisiensi layanan, tetapi juga dari kemampuan pemerintah daerah merancang kebijakan transformasional yang meningkatkan kesejahteraan, daya saing wilayah, serta keberlanjutan pembangunan. Selain itu, laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai E-Government Survey (United Nations, 2020) menunjukkan bahwa transformasi digital sektor publik berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas layanan, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Digitalisasi pelayanan memungkinkan akses layanan yang lebih luas, cepat, dan inklusif sehingga memperkuat kepercayaan publik serta meningkatkan nilai sosial dari kebijakan pembangunan daerah. Hal ini menegaskan bahwa inovasi teknologi dan penguatan kapasitas institusional menjadi bagian penting dari kompetensi inti pemerintah daerah dalam menciptakan nilai publik.

Pada grafik 2. data tren Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Lebak tahun 2021–2025 menunjukkan peningkatan konsisten dari sekitar 79,95 menjadi 84,95, yang mencerminkan adanya perbaikan kualitas pelayanan publik dan penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa perencanaan strategis daerah telah mampu menghasilkan nilai nyata bagi masyarakat melalui peningkatan mutu layanan, efisiensi birokrasi, serta inovasi pelayanan publik. Hal ini sejalan dengan dimensi core competence berupa contribution to customer value, di mana kompetensi inti pemerintah daerah tercermin dari kemampuan menciptakan manfaat langsung bagi masyarakat sebagai pengguna layanan publik.

Selain itu, peningkatan nilai IKM yang semakin merata di berbagai perangkat daerah menunjukkan adanya penguatan standar pelayanan serta integrasi kebijakan pembangunan yang lebih efektif. Meskipun masih terdapat beberapa perangkat daerah dengan capaian relatif rendah pada awal periode, tren positif secara keseluruhan menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Lebak telah menunjukkan kompetensi inti dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan. Dengan demikian, aspek contribution to customer value dalam core competence terlihat dari kemampuan pemerintah daerah menghasilkan kepuasan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup, serta memperkuat kepercayaan publik melalui perencanaan strategis pembangunan daerah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Lebak 2021-2025 mencerminkan penguatan core competence pemerintah daerah dalam memberikan nilai publik melalui peningkatan kualitas pelayanan. Temuan ini sejalan dengan Osborne (2018) yang menekankan bahwa orientasi public value menjadi indikator utama keberhasilan sektor publik dalam menciptakan manfaat nyata bagi masyarakat. Bryson (2018) juga menyatakan bahwa perencanaan strategis pemerintah daerah harus berorientasi pada peningkatan kepuasan masyarakat dan kualitas layanan publik. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada fokus peningkatan pelayanan publik sebagai manifestasi kompetensi inti pemerintah daerah dalam menciptakan nilai sosial dan kesejahteraan masyarakat.

This is an open-access article under the CC–BY NC-SA license

Sawala
Jurnal Administrasi Negara
ISSN: 2598-4039 (Online)
ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright © 2026, Rusito, Jumanah
http://doi.org/10.30656/sawala.v14i1.zzf2rt61 to this article
Page 30-50
Volume 14 Number 1 (Juni) 2026

Selain itu, OECD (2019) menegaskan bahwa inovasi kebijakan, digitalisasi layanan publik, dan penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah berperan penting dalam meningkatkan kualitas layanan dan kepercayaan masyarakat. Sejalan dengan itu, Teece (2018) melalui konsep dynamic capabilities menunjukkan bahwa kemampuan organisasi beradaptasi terhadap kebutuhan pemangku kepentingan menjadi kunci penciptaan nilai berkelanjutan. Persamaan dengan penelitian ini terlihat pada pentingnya inovasi kebijakan, adaptasi kelembagaan, serta efisiensi birokrasi dalam meningkatkan kepuasan masyarakat. Namun, penelitian ini memiliki perbedaan karena lebih menekankan analisis empiris pada konteks RPJMD Kabupaten Lebak sebagai instrumen perencanaan strategis daerah.

Selanjutnya, Ansell dan Torfing (2017) menyoroti pentingnya inovasi kolaboratif dalam tata kelola pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan nilai sosial. Temuan tersebut memiliki kesamaan dengan hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa peningkatan IKM berkaitan dengan integrasi kebijakan, inovasi pelayanan, dan penguatan kapasitas kelembagaan daerah. Perbedaannya, penelitian ini lebih spesifik menempatkan core competence pemerintah daerah sebagai kerangka analisis dalam perencanaan strategis pembangunan daerah, sehingga memberikan kontribusi empiris pada kajian manajemen strategis sektor publik di tingkat pemerintah daerah.

Aspek sulit ditiru oleh pesaing (Difficult to imitate)

Aspek difficult to imitate dalam dimensi core competency pada perencanaan strategis merujuk pada kemampuan organisasi untuk membangun keunggulan yang berbasis pada pengetahuan kolektif, pengalaman kelembagaan, inovasi kebijakan, serta integrasi sumber daya yang kompleks sehingga tidak mudah direplikasi oleh pihak lain. Teece (2018) melalui konsep dynamic capabilities menjelaskan bahwa keunggulan strategis organisasi terbentuk dari kemampuan adaptasi, inovasi berkelanjutan, serta pengelolaan pengetahuan yang terinternalisasi dalam sistem organisasi. Bryson (2018) juga menegaskan bahwa dalam sektor publik, kapasitas kelembagaan, kepemimpinan strategis, dan budaya organisasi yang kuat menjadi faktor pembeda yang sulit ditiru dalam menghasilkan kebijakan dan pelayanan publik yang efektif.

Selain itu, OECD (2019) menyoroti bahwa inovasi kebijakan, transformasi digital, serta tata kelola kolaboratif menjadi sumber keunggulan institusional pemerintah yang tidak mudah direplikasi karena bergantung pada konteks lokal, jejaring kelembagaan, dan pengalaman organisasi. Osborne (2018) menambahkan bahwa penciptaan public value yang berkelanjutan membutuhkan integrasi kompetensi organisasi, partisipasi masyarakat, dan inovasi pelayanan yang spesifik terhadap karakteristik daerah. Dengan demikian, dalam konteks perencanaan strategis pemerintah daerah, aspek difficult to imitate tercermin pada kemampuan membangun tata kelola inovatif, kapasitas institusional, serta strategi pembangunan berbasis potensi lokal yang menjadi keunggulan kompetitif daerah secara berkelanjutan.

Aspek difficult to imitate dalam dimensi core competency pada konteks perencanaan strategis daerah merujuk pada kemampuan pemerintah daerah membangun keunggulan institusional yang berbasis pada pengalaman kelembagaan, inovasi kebijakan, budaya organisasi, serta pengelolaan sumber daya lokal yang spesifik sehingga sulit direplikasi oleh daerah lain. Teece (2018) melalui konsep dynamic capabilities menegaskan bahwa keunggulan strategis organisasi terbentuk dari kemampuan adaptasi berkelanjutan, inovasi kebijakan, serta pengelolaan pengetahuan organisasi yang terinternalisasi dalam sistem kelembagaan. Bryson

This is an open-access article under the CC–BY NC-SA license

Sawala
Jurnal Administrasi Negara
ISSN: 2598-4039 (Online)
ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright © 2026, Rusito, Jumanah
http://doi.org/10.30656/sawala.v14i1.zzf2rt61 to this article
Page 30-50
Volume 14 Number 1 (Juni) 2026

(2018) juga menyatakan bahwa keberhasilan perencanaan strategis sektor publik sangat dipengaruhi oleh kapasitas institusional, kepemimpinan strategis, serta integrasi kebijakan yang kontekstual terhadap karakteristik daerah.

Selain itu, OECD (2019) menekankan bahwa inovasi tata kelola, transformasi digital, dan kolaborasi multipihak menjadi faktor penting dalam membangun keunggulan pemerintah daerah yang tidak mudah ditiru karena dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, dan budaya lokal. Osborne (2018) menambahkan bahwa penciptaan public value yang berkelanjutan membutuhkan integrasi kompetensi organisasi, partisipasi masyarakat, serta inovasi pelayanan publik yang sesuai dengan konteks daerah. Dengan demikian, dalam perencanaan strategis daerah, aspek difficult to imitate tercermin pada kemampuan pemerintah daerah mengembangkan kebijakan inovatif, tata kelola adaptif, serta optimalisasi potensi lokal sebagai keunggulan strategis pembangunan yang berkelanjutan.

Selanjutnya, pendekatan public sector innovation ecosystems menegaskan bahwa keunggulan institusional pemerintah daerah sering kali terbentuk dari interaksi kompleks antara aktor pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat dalam suatu ekosistem inovasi yang khas. Karo dan Kattel (2020) menunjukkan bahwa konfigurasi jejaring inovasi, praktik kelembagaan, serta kapasitas pembelajaran organisasi menghasilkan model tata kelola yang kontekstual dan sulit direplikasi oleh daerah lain karena sangat dipengaruhi oleh sejarah institusi, budaya organisasi, serta dinamika sosial-ekonomi lokal. Selain itu, studi mengenai institutional capacity dan collaborative governance menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh kualitas kepemimpinan adaptif, kepercayaan antaraktor, serta mekanisme koordinasi lintas sektor. Emerson dan Nabatchi (2019) menjelaskan bahwa kapasitas kolaboratif yang terbangun melalui pengalaman institusional dan praktik tata kelola partisipatif menciptakan kompetensi khas organisasi sektor publik yang sulit ditiru karena melekat pada proses pembelajaran kolektif, norma kelembagaan, dan hubungan sosial yang telah berkembang dalam jangka panjang.

Lebih lanjut, literatur mengenai place-based development dan regional competitiveness menekankan bahwa keunggulan daerah sering berasal dari kombinasi unik antara aset lokal, kebijakan kontekstual, serta inovasi institusional yang berkembang secara historis. Barca, McCann, dan Rodríguez-Pose (2021) menegaskan bahwa strategi pembangunan berbasis karakteristik lokal menghasilkan diferensiasi kebijakan dan tata kelola yang tidak mudah direplikasi karena bergantung pada konfigurasi sumber daya, identitas wilayah, serta kapasitas institusi daerah. Perspektif ini memperkuat bahwa aspek difficult to imitate dalam perencanaan strategis daerah terkait erat dengan keunikan institusional dan pengelolaan potensi lokal secara berkelanjutan.

Data pada tabel 2 menunjukkan bahwa RPJMD Kabupaten Lebak 2025–2029 menempatkan penguatan inovasi kebijakan, peningkatan kualitas SDM, digitalisasi tata kelola pemerintahan, serta pembangunan infrastruktur strategis sebagai bagian dari kompetensi inti pemerintah daerah. Hal ini mencerminkan aspek difficult to imitate dalam core competence, karena keunggulan tersebut terbentuk dari integrasi pengalaman kelembagaan, karakteristik potensi lokal, inovasi kebijakan, serta pengelolaan sumber daya daerah yang spesifik. Visi pembangunan "Lebak RUHAY" juga menjadi identitas strategis daerah yang mencerminkan nilai lokal, orientasi pembangunan berkelanjutan, serta arah kebijakan yang kontekstual sehingga tidak mudah direplikasi oleh daerah lain.

This is an open-access article under the CC–BY NC-SA license

Sawala
Jurnal Administrasi Negara
ISSN: 2598-4039 (Online)
ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright © 2026, Rusito, Jumanah
http://doi.org/10.30656/sawala.v14i1.zzf2rt61 to this article
Page 30-50
Volume 14 Number 1 (Juni) 2026

Selain itu, pembangunan konektivitas infrastruktur desa, penguatan SDM unggul, serta digitalisasi layanan publik menunjukkan adanya proses pembelajaran kelembagaan dan inovasi berkelanjutan yang menjadi sumber keunggulan daerah. Kombinasi kebijakan berbasis potensi lokal, tata kelola adaptif, dan integrasi program lintas sektor menciptakan kapasitas institusional yang khas dan sulit ditiru. Dengan demikian, aspek difficult to imitate dalam core competence pemerintah Kabupaten Lebak tercermin pada kemampuan mengembangkan strategi pembangunan berbasis karakteristik lokal, inovasi kebijakan, serta penguatan kapasitas kelembagaan untuk mendukung daya saing dan keberlanjutan pembangunan daerah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi inti pemerintah daerah yang berbasis inovasi kebijakan, penguatan SDM, digitalisasi layanan publik, serta pemanfaatan potensi lokal menjadi keunggulan strategis yang relatif sulit ditiru daerah lain. Temuan ini sejalan dengan Teece (2018) yang menegaskan bahwa keunggulan organisasi terbentuk dari dynamic capabilities, yaitu kemampuan adaptasi, inovasi berkelanjutan, dan pengelolaan pengetahuan organisasi yang terinternalisasi. Bryson (2018) juga menyatakan bahwa kapasitas kelembagaan, kepemimpinan strategis, dan budaya organisasi sektor publik menjadi faktor pembeda dalam menghasilkan kebijakan dan pelayanan publik yang efektif. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada pentingnya kapasitas institusional dan inovasi kebijakan sebagai sumber keunggulan strategis daerah.

Selain itu, OECD (2019) menyoroti bahwa inovasi tata kelola, digitalisasi pelayanan publik, serta kolaborasi multipihak menjadi faktor penting dalam membangun keunggulan pemerintah daerah yang tidak mudah direplikasi karena sangat dipengaruhi oleh konteks lokal dan jejaring kelembagaan. Osborne (2018) juga menekankan bahwa penciptaan public value membutuhkan integrasi kompetensi organisasi, partisipasi masyarakat, dan inovasi pelayanan publik yang spesifik terhadap karakteristik daerah. Kesamaan dengan hasil penelitian ini terlihat pada penguatan inovasi kebijakan, layanan digital, dan integrasi program pembangunan sebagai bagian dari kompetensi inti pemerintah daerah. Perbedaannya, penelitian ini lebih menekankan analisis empiris pada konteks RPJMD Kabupaten Lebak sebagai instrumen konkret perencanaan strategis daerah.

Selanjutnya, Ansell dan Torfing (2017) menegaskan bahwa inovasi kolaboratif dalam tata kelola pemerintahan menghasilkan kebijakan yang kontekstual dan sulit ditiru karena terbentuk dari interaksi aktor lokal, pengalaman institusional, serta proses pembelajaran bersama. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian ini yang menunjukkan bahwa visi pembangunan "Lebak RUHAY", penguatan SDM, serta pembangunan infrastruktur berbasis potensi lokal mencerminkan keunggulan khas daerah. Perbedaannya, penelitian ini secara spesifik mengaitkan konsep core competence dengan dokumen perencanaan strategis daerah (RPJMD), sehingga memberikan kontribusi empiris pada pengembangan kajian manajemen strategis sektor publik di tingkat pemerintah daerah.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa core competence pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mendukung efektivitas perencanaan pembangunan daerah, khususnya melalui integrasi kapasitas kelembagaan, inovasi kebijakan, penguatan sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi dalam RPJMD Kabupaten Lebak 2025-2029. Implementasi kompetensi inti tersebut tercermin pada kemampuan pemerintah daerah memperluas akses pembangunan

This is an open-access article under the CC–BY NC-SA license

Sawala
Jurnal Administrasi Negara
ISSN: 2598-4039 (Online)
ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright © 2026, Rusito, Jumanah
http://doi.org/10.30656/sawala.v14i1.zzf2rt61 to this article
Page 30-50
Volume 14 Number 1 (Juni) 2026

lintas sektor, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat, serta membangun keunggulan daerah yang berbasis potensi lokal. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan core competence menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing wilayah dan mendukung pencapaian agenda pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Berdasarkan temuan tersebut, pemerintah daerah disarankan terus memperkuat kapasitas kelembagaan, inovasi kebijakan, digitalisasi pelayanan publik, serta pengembangan SDM aparatur agar kompetensi inti daerah semakin adaptif dan berkelanjutan. Selain itu, sinergi kebijakan pusat–daerah, kolaborasi multipihak, serta optimalisasi potensi lokal perlu ditingkatkan guna memastikan perencanaan strategis daerah mampu menghasilkan nilai publik yang lebih besar, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat posisi daerah dalam pembangunan nasional.

Secara teoritis, penelitian ini menunjukkan pentingnya pengembangan konsep core competence dalam konteks perencanaan strategis sektor publik, khususnya pemerintah daerah, dengan mengintegrasikan perspektif kapasitas kelembagaan, inovasi kebijakan, manajemen pengetahuan, dan tata kelola adaptif. Ke depan, kajian akademik disarankan memperluas pendekatan konseptual dan empiris mengenai core competence pemerintah daerah dengan mempertimbangkan dinamika transformasi digital, kolaborasi multipihak, serta konteks lokal pembangunan daerah agar kerangka teori manajemen strategis sektor publik semakin komprehensif dan relevan.

Secara praktis, pemerintah daerah disarankan memperkuat fokus perencanaan strategis pada pengembangan pariwisata berbasis budaya dan keagamaan sebagai bagian dari core competence daerah yang sulit ditiru. Potensi wisata desa adat Kanekes (Suku Baduy), Adat Kasepuhan Banten Kidul, serta identitas Lebak sebagai "Kabupaten Seribu Pesantren" dapat dikembangkan secara terintegrasi melalui peningkatan infrastruktur pendukung, promosi wisata, pemberdayaan masyarakat lokal, serta pelestarian nilai budaya dan religi. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan daya tarik pariwisata dan ekonomi lokal, tetapi juga menciptakan keunggulan kompetitif daerah yang khas dan berkelanjutan pada tingkat regional maupun nasional bahkan internasional.

REFERENSI

Ansell, C., & Torfing, J. (2017). *Public innovation through collaboration and design.* Routledge.

Ansell, C., & Torfing, J. (2021). *Public Governance as Co-Creation: A Strategy for Revitalizing the Public Sector.* Cambridge University Press.

Badan Pusat Statistik. (2025). *Indeks Pembangunan Manusia Indonesia 2015–2024*. BPS RI.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2025) *Undang-Undang 59 Nomor 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045*. Bappenas RI.

Badan Perencanaan Nasional. (2025). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembanugnan Jangka Menengah Nasional tahun 2025-2029.* Bappenas RI.

Bason, C. (2018). *Leading Public Sector Innovation: Co-Creating for a Better Society*. Policy Press.

Barca, F., McCann, P., & Rodríguez-Pose, A. (2021). *The case for regional development intervention: Place-based versus place-neutral approaches*. Journal of Regional Science, 61(1), 3–28.

Bryson, J. M. (2018). *Strategic planning for public and nonprofit organizations: A guide to strengthening and sustaining organizational achievement (5th ed*.). Jossey-Bass.

This is an open-access article under the CC–BY NC-SA license

Sawala

Jurnal Administrasi Negara

ISSN: 2598-4039 (Online)
ISSN: 2302-2221 (Print)

Copyright © 2026, Rusito, Jumanah
http://doi.org/10.30656/sawala.v14i1.zzf2rt61 to this article
Page 30-50
Volume 14 Number 1 (Juni) 2026

Burhanudin. (2025). *Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia.* Jurnal Ekonomi Pembangunan, 26(1), 45–58.

De Freitas, J. G., Costa, H. G., & Ferraz, F. T. (2021). *Balanced scorecard in the public sector: Benefits, challenges, and implementation factors.* Public Organization Review, 21(4), 763–781.

Emerson, K., & Nabatchi, T. (2019). *Collaborative governance regimes.* Georgetown University Press.

Farazmand, A. (2017). *Global encyclopedia of public administration, public policy, and governance.* Springer.

Hamel, G., & Prahalad, C. K. (1990). *The core competence of the corporation*. Harvard Business Review, 68(3), 79–91.

Karo, E., & Kattel, R. (2020). *Innovation ecosystems in the public sector: Connecting policy, practice, and theory*. Research Policy, 49(7), 103998.

Kattel, R., & Mazzucato, M. (2018). *Mission-oriented innovation policy and dynamic public sector capabilities.* Industrial and Corporate Change, 27(5), 787–801.

Kim, S. (2020). *Creating shared value: A systematic review and research agenda*. Journal of Business Ethics, 168(2), 353–370.

Madsen, D. Ø. (2025). *The balanced scorecard in the public sector: Developments, trends, and future research directions.* International Journal of Public Sector Management. Advance online publication.

Mazzucato, M. (2021). *Mission economy: A moonshot guide to changing capitalism.* Harper Business.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2019). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook (4th ed.).* Sage Publications.

OECD. (2019). *Innovation Skills and Leadership in the Public Sector.* Paris: OECD Publishing.

OECD. (2021). *Government at a Glance 2021*. Paris: OECD Publishing.

OECD. (2023). *Embracing Innovation in Government*: Global Trends 2023. Paris: OECD Publishing.

Osborne, S. P. (2018). *From public service-dominant logic to public service logic: Are public service organizations capable of co-production and value co-creation*? Public Management Review, 20(2), 225–231.

Osborne, S. P. (Ed.). (2018). *The new public governance? Emerging perspectives on the theory and practice of public governance*. Routledge.

Pemerintah Kabupaten Lebak. (2025). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebak Tahun 2025–2029.* Baperida Kabupaten Lebak.

Pemerintah Kabupaten Lebak. (2025). *Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025-2029.* Baperida Kabupaten Lebak.

Pollitt, C., & Bouckaert, G. (2017). *Public Management Reform: A Comparative Analysis (4th ed.).* Oxford University Press.

Rahman. (2024). *Pembangunan sumber daya manusia dan daya saing global menuju Indonesia Emas 2045.* Jurnal Kebijakan Pembangunan, 19(2), 101–115.

Rizun, M., Oleksiv, I., & Bilan, Y. (2023). *Public value governance and collaborative networks in public administration transformation.* Sustainability, 15(9), 7203.

Teece, D. J. (2018). *Dynamic capabilities as (workable) management systems theory*. California Management Review, 60(4), 5–22.

Torfing, J. (2019). *Collaborative innovation in the public sector: The argument*. Public Management

This is an open-access article under the CC–BY NC-SA license

Sawala

Jurnal Administrasi Negara

ISSN: 2598-4039 (Online)
ISSN: 2302-2221 (Print)

Copyright © 2026, Rusito, Jumanah
http://doi.org/10.30656/sawala.v14i1.zzf2rt61 to this article
Page 30-50
Volume 14 Number 1 (Juni) 2026

Review, 21(1), 1–11.

United Nations. (2020). *United Nations e-government survey 2020: Digital government in the decade of action for sustainable development*. United Nations Department of Economic and Social Affairs.

Yang, Y., Wang, H., & Chen, J. (2020). *Creating shared value: Corporate social responsibility, innovation capability, and competitive advantage.* Sustainability, 12(21), 9175

This is an open-access article under the CC–BY NC-SA license